

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesenjangan antara masyarakat yang telah dan belum mendayagunakan TIK disebut sebagai kesenjangan digital (Smith, 2015). Pada awalnya, kesenjangan digital didefinisikan sebagai perbedaan akses terhadap TIK tetapi kemudian mengalami pergeseran pengertian seiring dengan perkembangan TIK. Kesenjangan digital bukan hanya merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap TIK dengan yang tidak. Kesenjangan digital juga merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakannya (Dewan & Riggins, 2005) (Hargittai, 2003). Kesenjangan digital juga didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan TIK mengenai cara mengakses dan menggunakannya berdasarkan segi ekonomi penggunaannya (Baase, 2012) (Dewan & Riggins, 2005). Sedangkan kesenjangan digital yang dikemukakan oleh fong dkk sebagai kesenjangan akses komputer dan internet antara pria dan wanita, antara orang dengan status sosial ekonomi (Prieger & Wei-Min Hu, 2008) yang berbeda (pendidikan, pekerjaan, pendapatan serta kekayaan), usia dan antar area atau daerah. (Fong E, 2001). Dengan mengurangi kesenjangan digital, maka dapat mengejar ketinggalan berbagai sektor seperti ekonomi, politik dan pemerintahan.

Salah satu yang dibahas di penelitian ini yaitu kesenjangan yang terjadi di pemerintahan (*e-government*). Pemanfaatan ICT didalam pemerintahan ini biasa disebut *e-government* (Siau, 2005). *E-government* merupakan penerapan IT dalam pemerintahan yang bertujuan membuat penyederhanaan proses kerja dalam pemerintahan,serta lebih akurat,responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan (Gupta & Debashish Jana, 2003). Dengan semakin cepatnya pertumbuhan informasi menjadikan pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk memberikan *service* atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Dewi, 2013),internal pemerintahan,antar pemerintah maupun entity perintahan yang melakukan transformasi *e-government* sebagai perubahan layanan dengan menggunakan teknologi informasi pada instansi pemerintahan (Nurdin, et al., 2012) (Veenstra & Marijn Janssen, 2012)

Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi beragam perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Teknologi Informasi (TI). Masyarakat memanfaatkan TI untuk mendapatkan dan menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah Republik Indonesia mendorong bangsanya menuju masyarakat informasi melalui program pengembangan *e-government*. Dengan adanya implementasi *e-government* maka pemerintah dapat mengurangi penggunaan kertas, mengurangi waktu respon, menyediakan layanan bagi masyarakat terhadap layanan *e-government* (Alruwaie, et al., 2012).

Penerapan *e-government* di Indonesia pada tahun ketahun mengalami perubahan yang signifikan salah satunya pada *e-government* kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang meraih penghargaan dari Menristek pada tahun 2013 sebagai Kota percontohan penerapan *e-government* berbasis teknologi *open source*, K.H. Dewantara Award (penerapan TIK untuk pendidikan) dari Kemendiknas tahun 2013 (administrator, 2015). Pengembangan *e-government* di kota Pekalongan dimulai sejak tahun 2008 dan mendapatkan predikat sebagai kota terbaik dari PEGI 2014 dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (e-Government, 2015). Kota Pekalongan memiliki visi membangun *smart city*, yaitu kota unggul yang berdaya saing berbasis keunggulan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan moral (Administrator, 2011). Pengetahuan terhadap IPTEK, yang didalamnya termasuk TIK, mutlak diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Namun masyarakat Kota Pekalongan tidak semuanya memiliki akses dan kemampuan terhadap TIK. Perbedaan akses dan kemampuan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan digital masyarakat di Kota Pekalongan.

Kesenjangan digital di kota Pekalongan perlu adanya pengukuran sebagai bahan pertimbangan pemerintah kota Pekalongan dalam penyusunan strategi dan kebijakan pelayanan publik yang terkait dengan TIK (Administrator, 2011). Hasil dari pengukuran kesenjangan digital dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam pemerataan akses dan kemampuan TIK bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur maupun program pelatihan untuk pengembangan SDM (Pekalongan, 2015). Pada pengukuran kesenjangan digital

ini menggunakan metode SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*).

SIBIS merupakan hasil kegiatan dari komisi Eropa (*European Commission*) yang digunakan untuk menganalisa serta membandingkan berbagai macam indikator yang berbeda untuk mengukur kesenjangan digital (SIBIS, 2003). Pengukuran kesenjangan digital menggunakan indikator SIBIS GPS telah sukses diterapkan dalam pengukuran kesenjangan antar negara dalam masyarakat di Uni Eropa. Dalam penelitian ini menggunakan SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) GPS (*General Population Survey*) dengan menggunakan indikator perilaku penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet dan *e-government*.

Hasil kajian dari SIBIS (2003), bahwa ada tiga dimensi dalam melakukan penilaian dari pelaksanaan *e-government*, yaitu tersedianya *e-government*, pemakaian *e-government*, serta penilaian *e-government*. Pertama, tersedianya *e-government* merupakan tersedianya layanan *online* pemerintah bagi masyarakat, kesadaran warga masyarakat terhadap tersedianya layanan *online* pemerintah, serta keseimbangan *index* pemerintah. Kedua yaitu pemakaian *e-government* merupakan pengalaman masyarakat dalam menggunakan jasa layanan *online* yang telah disediakan pemerintah, serta penggunaan layanan *online* yang telah disediakan pemerintah bagi masyarakat. Ketiga yaitu penilaian *e-government* merupakan layanan *online* pemerintah yang diutamakan untuk masyarakat, sikap masyarakat terhadap pelayanan publik, serta persepsi keselamatan bagi masyarakat pada layanan *online* pemerintah (SIBIS, 2003). Oleh sebab itu, maka

penelitian ini mencoba mengadopsi indikator SIBIS GPS yang digunakan untuk mengukur kesenjangan digital masyarakat di kota pekalongan dengan menyesuaikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Pekalongan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek perilaku penggunaan internet?
- b. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dari aspek kegunaan penggunaan internet?
- c. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek *e-government*?
- d. Bagaimana tingkat kesenjangan yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek demografi?

1.3. Batasan Masalah

Agar pelaksanaan dan tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan baik, maka model pengukuran dibatasi dengan cara menganalisis kondisi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Pekalongan dan berdasarkan konsep kesenjangan digital. Kemudian menentukan variabel-variabel yang sesuai yang diasumsikan mempengaruhi kesenjangan digital di Kota Pekalongan dan memilih indikator-indikator yang sesuai dari instrumen SIBIS.

Model pengukuran yang dikembangkan adalah lingkup individu atau masyarakat Kota Pekalongan.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan di Kota Pekalongan.
- b. Obyek penelitian adalah masyarakat Kota Pekalongan.
- c. Pengambilan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Kota Pekalongan.
- d. Kesenjangan digital masyarakat di kota pekalongan diukur dari aspek perilaku kegunaan internet (penggunaan komputer, penggunaan internet, akses internet dan indeks kesenjangan digital), kegunaan penggunaan internet (durasi & intensitas penggunaan internet, penghentian penggunaan internet, dan penggunaan *email*), *e-government* (tersedianya *e-government*, pemakaian *e-government* dan penilaian *e-government*) dan demografi (umur, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan)

1.4. Keaslian penelitian

Berdasarkan studi literatur dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang pengukuran kesenjangan digital pada implementasi *e-government* masyarakat di kota pekalongan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan informatika pada umumnya dan teknik informatika pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah, serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu kesenjangan digital masyarakat di kota pekalongan.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi Magister teknik informatika di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek perilaku penggunaan internet.

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek kegunaan penggunaan internet.
3. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang terjadi masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek *e-government*.
4. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan masyarakat di kota pekalongan dilihat dari aspek demografi.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis berdasarkan tata cara penulisan laporan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan urutan penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi *e-government*, dan pengukuran tingkat kesenjangan digital.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, pengujian validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian.